

ANALISIS ASET PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Hermawansyah, Budiman Sakti*), Henny Aprianty

Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia
Email Koresponensi : budimansakti63@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengolahan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur berdasarkan aspek penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan Dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang ASN BKD Kabupaten Kaur, Berdasarkan penelitian diperoleh hasil yaitu : 1.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek Penggunaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 hal ini di buktikan dengan adanya dokumen penunjang penggunaan. misalnya dengan penetapan status pengguna barang yang ditanda tangani oleh Bupati/Kepala OPD. 2.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek penatausahaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan telah di lakukan pencatat aset dalam buku inventaris dan buku induk sesuai dengan hasil kondisi aset. Melalui pencatatan buku inventaris yang lengkap, maka akan mendukung pelaksanaan pengelolaan aset yang baik dan transparan dengan di dukung oleh data yang handal. 3.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek pemanfaatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terbukti pada BKD Kabupaten Kaur dari hasil wawancara menunjukkan tidak ada aset yang dipinjam pakai atau dikelola oleh pihak lain, 4.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek pengamanan dan pemeliharaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan pengamanan fisik

Kata Kunci : Aset, Penggunaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

Abstract

This study aims to determine how the asset management system at the Regional Finance Agency of Kaur Regency is based on aspects of use, administration, utilization, security and maintenance, and guidance, supervision and control in accordance with Permendagri Number 19 of 2016. The type of research used in this study is research. qualitative descriptive. The research data were collected by means of observation, interviews and documentation observations. Interviews were conducted with 10 ASN BKD Kaur Regency. Based on the research, the results obtained are: 1.) Regional Asset Management at BKD Kaur Regency in terms of the aspect of use is in accordance with Permendagri Number 19 of 2016 this is proven by the existence of supporting documents for use. for example by determining the status of the user of the goods which is signed by the Regent/Head of OPD. 2.) Regional Asset Management at the BKD of Kaur Regency in terms of the administrative aspect has complied with the applicable rules, this is evidenced by having recorded assets in the inventory book and the master book in accordance with the results of the asset condition. Through recording a complete inventory book, it will support the implementation of good and transparent asset management supported by reliable data. 3.) Management of Regional Assets at the BKD of Kaur Regency in terms of the utilization aspect has complied with the applicable rules, this is proven in the BKD of Kaur Regency from the interview results showing that there are no assets that are borrowed or managed by other parties, 4.) Regional Asset Management at BKD Kaur Regency in terms of security and maintenance aspects have been in accordance with applicable rules, including administrative security, legal security and physical security.

Keywords : Assets, Use, Development, Supervision And Control

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, menandai dimulainya era baru Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). PP tersebut merupakan pengganti PP Nomor 6 tahun 2006, walaupun sebahagian besar masih mengadopsi kerangka peraturan PP Nomor 6 tahun 2006. Dalam pelaksanaannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diatas, diharapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan dan pengelolaan aset dengan baik. Pengelolaan aset secara efektif, efisien, berguna bagi masyarakat umum dan pemerintah itu sendiri.

PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur secara lengkap cara penataan dan pengelolaan aset pemerintah tentang pengadaan, hibah, pemanfaatan, pengelolaan dan pihak yang bertanggungjawab, bukan hanya sekedar kegiatan administratif (pencatatan) saja. Tetapi berfikir yang mendalam menangani aset daerah, bagaimana meningkatkan pengelolaan aset secara efektif, efisien, dan dapat menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yaitu: pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian pemusnahan, penghapusan, pemin-

dah tangan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah.

Pentingnya pengelolaan barang milik daerah bagi pemerintah, sudah menjadi sebuah keharusan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah yang dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Diterbitkannya PP dan Permendagri diatas, pemerintah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui pemanfaatan aset daerah yang merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah, sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penataan dan pengelolaan aset daerah secara baik dan akurat adalah sangat penting.

Masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan aset pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur, yaitu dokumen kepemilikan selain tanah dan/ atau bangunan tidak disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna barang, Pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh pengurus barang belum lengkap dan benar, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak menggambarkan semua aset tetap yang ada pada masing-masing ruangan, Pengurus barang tidak melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola (Bidang Aset) dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah di KIB ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu.

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengelolaan barang milik daerah

seperti yang dikutip oleh Wijito dan Waloejo (2014) (dalam Ricke Devy Herliani; 2016) bahwa tujuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah terwujudnya administrasi tertib hukum dan tertib pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah dengan target opini WTP pada setiap Kementerian/ Lembaga dan pada daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan atau Kotamadya.

Dari berbagai permasalahan yang timbul diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manajemen pengelolaan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Sugiono (2013) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu terhadap suatu objek atau kondisi tertentu. dilakukan dari bulan Juli sampai dengan September 2019. Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Informen dalam penelitian ini sebanyak 10 orang ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur (BKD), yang terdiri dari Kapala BKD, Sekretaris BKD, Kasi Pengadaan, Kasi pemanfaatan dan pengendalian, Kasi perencanaan dan pelaporan, tiga orang Staf/oprator aset, satu orang pengelola barang serta satu orang staf pengelola barang. Instrumen Penelitian Menurut Sugiyono (2014:222): "Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumen. analisis data penelitian dengan analisis kualitatif.

Penelitian kualitatif suatu kegiatan analisis data mulai dari awal penelitian melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh Bogdan dan Biklen (2005).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur merupakan Organisasi Perangkat Daerah melakukan satu fungsi sebagai pengguna barang, dimana tugas dari pengguna barang adalah melakukan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pengendalian, pembinaan, pembiayaan dan ganti rugi. Disampaikan bahwa karakteristik informen ditinjau dari jenis kelamin semua laki-laki, sedangkan perempuan tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai bagian pengelolaan atau penguasaan barang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur didominasi oleh laki-laki, dikarenakan dalam melaksanakan tugas pengurusan barang lebih berat. Dalam pelaksanaan pengelolaannya dituntut tenaga lebih besar dan waktu yang panjang untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap aset yang ada.

Karakteristik informen menunjukkan umur antara 30 sampai 40 tahun sebanyak 6 orang, umur antara 41 sampai 50 tahun 3 orang, dan umur diatas 50 sebanyak 1 orang. Sedangkan umur dibawah 30 tahun tidak ditemukan, hal ini dimung-

kinkan dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan pengalaman yang lebih lama untuk mempermudah pengelolaan aset itu sendiri.

Berdasarkan data kategori usia menunjukkan sebahaiian besar informen pengelolaan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur memiliki rentang antara usia 31 sampai 40 tahun. Usia tersebut masih sangat produktif dengan semangat kerja yang tinggi. Data ini juga dapat menunjukkan bahwa pegawai yang bertugas dalam pengelolaan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur memiliki rentang usia 30 sampai 40 tahun, dikarnakan dalam pengelolaan aset membutuhkan tenaga yang lebih dan pengalaman yang luas. Sehingga dalam pengelolaan aset yang ada dapat dilakukan dengan baik, terjaga dan terawat keberadaannya.

Berdasarkan pendidikan terakhir, informen memiliki pendidikan diploma sebanyak 2 orang, sarjana (S1) sebanyak 6 orang dan informen memiliki pendidikan pascasarjana sebanyak 2 orang. Sedangkan informan yang memiliki pendidikan SMA (sederajat) tidak ada, hal ini berarti bahwa informan pelaksanaan pengelolaan aset di BKD Kabupaten Kaur secara umum memiliki latar belakang pendidikan kategori tinggi.

Aspek Pengelolaan Aset Pada BKD Kabupaten Kaur Aspek Penggunaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis pengelolaan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur pada indikator penggunaan sudah optimal dan efisien hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung pelaksanaan pengelolaan aset, daftar pengguna barang dan

kartu inventaris barang, laporan semesteran dan laporan tahunan, KIB dan KIR. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pasal 43.

Aspek Penatausahaan

Kegiatan Penatausahaan aset daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset BKD Kabupaten Kaur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pencatatan sudah dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian atas setiap aset yang ada sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak membutuhkan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan aset barang milik daerah secara terbuka.

Pelaksanaan penatausahaan yang dievaluasi meliputi pencatatan tidak dilakukan atau tidak akurat dan aset tidak didukung dengan data yang handal. Berdasarkan hasil analisis bahwa pencatatan aset sudah dilakukan inventaris barang yang ada dengan pengecekan secara langsung oleh pengurus barang pada saat penetapan status pengguna barang, pengecekan kondisi aset juga dilakukan per enam bulan sekali dengan pengecekan fisik. Sebagai contoh kondisi bangunan seperti cat, pintu, pelapon, dan ruangan apakah dalam kondisi baik atau tidak. Pada kendaraan dilakukan pengecekan oleh pengurus barang seperti pergantian oli, ban, spare part.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset telah dicatat dalam buku inventaris dan buku induk sesuai dengan hasil kondisi aset. Melalui pencatatan buku

inventaris yang lengkap, maka akan mendukung pelaksanaan pengelolaan aset yang baik dan transparan dengan di dukung oleh data yang handal.

Aspek Pemanfaatan

Berdasarkan aspek pemanfaatan pengelolaan aset daerah dapat dilihat dari dokumen surat perijinan pjmjam pakai. Surat perijinan pjmjam pakai digunakan jika pada suatu OPD ada aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain misalnya sewa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur tidak memiliki dokumen tersebut. Berdasarkan hasil analisis tentang kelengkapan dokumen pemanfaatan aset telah sesuai dengan aturan.

Berdasarkan hasil komfirmasi pertanyaan tentang aspek pemanfaatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur telah sesuai. Hasil wawancara terhadap pengurus barang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur menunjukkan tidak ada aset yang dipinjam pakai atau dikelola oleh pihak lain, hal ini dikarenakan jumlah aset yang ada telah sesuai dengan kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan

Aspek pengamanan dan pemeliharaan aset dilihat dari dokumen bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah atau pegawai pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Berdasarkan hasil observasi dokumen aspek pengamanan dan pemeliharaan aset pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : ditemukan dokumen bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa kepemilikan aset adalah atas nama

pemerintah daerah. Berdasarkan kelengkapan dokumen tentang aspek pengamanan dan pemeliharaan aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur sudah melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset secara hukum sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi :” pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan Hukum, “. Contoh pemeliharaan fisik bangunan dilakukan dengan pemeliharaan secara rutin sekali dalam setahun sedangkan pada kendaraan melakukan *service*.

Berdasarkan semua indikator pengamanan dan pemeliharaan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan, hal ini membuktikan secara administrasi telah dilakukan pengamanan aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara membuktikan secara administrasi terjadi pemeliharaan aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Contoh setiap aset yang digunakan tercantum penanggungjawab yang dibuktikan dengan penetapan status pengguna.

Aspek Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan analisis dokumen pada aspek pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk mendapatkan bukti fisik data, sehingga diketahui apakah BKD sudah melakukan pembinaan terkait pengelolaan aset, yang menjadi dokumen berupa sertifikat pelatihan. Berdasarkan hasil observasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur ditemukan sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengelolaan Barang. Hal ini menunjukkan aspek pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan

yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan dalam pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah wajib menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah dalam pengelolaan aset, sebelumnya telah dilakukan pelatihan tentang pengelolaan aset dengan tujuan memberikan pengetahuan mendalam bagi petugas pengelola aset daerah serta pelaksanaan pelaporan aset.

D. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan aset di BKD Kabupaten Kaur berdasarkan aspek penggunaan, Aspek Penatausahaan, Aspek Pemanfaatan, Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan, Aspek Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian telah sesuai dengan permendagri Nomor 19 tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Arifin S. dan Wahyuni T. 2016. *Implementasi Dimensi Kualitas dan Dampaknya Terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. Vo. 4, No. 1.
- Hasibuan, S.p. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung Bumi Akasara.
- Bogdan dan Biklen. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Buku Ilmiah Populer. Bogor.
- Peraturan Pemerintah No. 6. *Tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah (BMN/D)*. (2006).
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. ***Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah***.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014. ***Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah***.
- Sugiyono. 2010. *Penelitian Deskriptif Kualitatif (Validitas Dan Realibilitas Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV